

BAB V

KESIMPULAN

Peluang serta tantangan yang kini dihadapi oleh Indonesia dalam industri otomotif beragam. Mulai dari industri komponen otomotif dalam negeri yang terus berkembang, produksi kendaraan khususnya roda empat yang terus meningkat, Indonesia sebagai pasar yang besar dan juga ketersediaan tenaga kerja. Walaupun demikian masih menjadi tugas besar bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan industri otomotif Indonesia seperti Thailand yang masih memegang sebagai negara dengan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara, masih tingginya impor yang dilakukan Indonesia, pabrikan asal Jepang yang masih menguasai industri otomotif Indonesia sehingga program mobil nasional dan mobil listrik masih dalam angan-angan, serta tantangan baru dengan adanya Trans Pacific Partnership (TPP).

Maka dari itulah pemerintah Indonesia dalam hal ini mempunyai strategi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam industri otomotif terutama kendaraan roda empat. Setidaknya terdapat dua strategi besar yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo ini yaitu melalui Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dengan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Memaksimalkan Industri Otomotif Indonesia dan Pembaruan Aturan untuk Melindungi Industri Otomotif Lokal terhadap Arus Investasi dan Impor Komponen Industri Otomotif dari Perusahaan Multinasional . Untuk mendukung strategi tersebut, yang *pertama* yaitu melakukan peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintah yang dalam hal ini yaitu terdapat beberapa kementerian. Setidaknya terdapat lima kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Bentuk dari kerjasama tersebut yaitu penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri. Tentu saja hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk membangun industri dengan mulai menyiapkan dari sumber daya manusianya. Melalui upaya membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industry diharapkan melalui upaya tersebut nantinya sudah siap ditempatkan dalam dunia kerja khususnya industri.

Kemudian yang *kedua* dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Kebijakan Industri, Kebijakan Perdagangan, dan Kebijakan mengenai Ketengakerjaan dalam paket kebijakan ini. Melalui kementerian terkait, masing-masing lembaga tersebut mengeluarkan aturan dan kerjasam baru untuk meningkatkan kualitas industri otomotif Indonesia.

Strategi yang *ketiga* adalah dengan pembaruan aturan penanaman modal asing (PMA). Pada masa pemerintah Joko Widodo mengeluarkan aturan baru melalui kepala BKPM untuk menggantikan aturan yang lama. Aturan yang baru ini yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Hal ini dilakukan guna memberikan kejelasan mengenai aturan dan tata cara bagi penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Selanjutnya strategi yang *keempat* yaitu dengan pembatasan impor komponen industri otomotif. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menekan besarnya impor komponen otomotif di Indonesia. Selain itu, pembatasan impor komponen ini juga adalah upaya pemerintah untuk melindungi industri komponen lokal agar mendapatkan pasar di dalam negeri. Dengan ditekannya keran impor, penggunaan komponen

impor juga akan berkurang. Sebaliknya, penggunaan komponen lokal diharapkan terus meningkat.

Kemudian strategi yang terakhir yaitu yang *kelima* adalah memaksimalkan transfer teknologi (alih teknologi) dari perusahaan multinasional otomotif di Indonesia. Perusahaan asal Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Honda dan yang lainnya merupakan pabrik terbesar yang ada di Indonesia. Sudah cukup lama pabrik otomotif tersebut melakukan aktifitasnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tentu saja mengharapkan adanya transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Secara singkat dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.1: Strategi Pemerintah Joko Widodo

Masalah	Kebijakan/Kerjasama	Implementasi	Hambatan
Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang mumpuni	Penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Industri	Membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang <i>link and match</i> , restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.	Pemerintah belum mengimplementasikan kepada semua sekolah kejuruan yang memiliki jurusan tersebut.
Tenaga kerja asing yang	Undang-Undang Penanaman Modal pasal 10	Kementerian Ketenagakerjaan melakukan	Masing banyak tenaga kerja asing ilegal dan tidak sesuai

terus berdatangan ke Indonesia	yang mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan	tidak dan razia terhadap tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	dengan keahlian yang dibutuhkan berkeliaran di Indonesia
Arus investasi asing yang semakin deras	Menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.	Investasi asing hanya boleh dilakukan pada beberapa sektor saja yang telah ditentukan.	Indonesia masih bergantung pada investasi asing, sehingga banyak sektor yang dikuasai oleh pihak-pihak asing.
Impor komponen otomotif yang terus meningkat	Menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 sebagai revisi atas peraturan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau	Industri otomotif dari perusahaan multinasional diwajibkan untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri	Belum semua produk kendaraan jadi mempunyai tingkay kandungan dalam negeri yang sama, hanya kelas mobil murah (LCGC) yang sudah cukup

	Lebih dan Industri Sepeda Motor.	(TKDN).	tinggi yaitu 80%
Alih teknologi yang belum berjalan semestinya	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan	Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional disertai dengan alih teknologi.	Tidak semua program CSR langsung disertai dengan alih teknologi
Komponen pendukung dari industri dalam negeri belum mencukupi	Pengurangan tarif bea masuk (BM) impor bahan baku	Pemberian insentif untuk industri komponen otomotif Indonesia berupa pengurangan tariff tersebut	Skala industri kecil menengah (IKM) masih belum mampu mencukupi kebutuhan komponen industri otomotif

Walaupun masih terdapat permasalahan dan hambatan, menggiatnya industri otomotif di Indonesia tentu saja berdampak positif bagi industri penunjang, yaitu industri komponen otomotif dalam negeri. Apalagi dengan terus dikurangnya impor bahan baku untuk pembuatan kendaraan terutama roda empat. Selain itu, pemerintah juga terus menekankan kepada pelaku industri otomotif untuk mematuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam perakitan kendaraan. Dengan hal tersebut tentu saja akan meningkatkan produksi dan penggunaan lokal yang terus meningkat.